

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG**
(Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015)

Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
Widhi Sunardika, S.Ak.

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung dalam periode 2009 – 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2009 – 2014.

Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t hitung lebih besar dari t tabel ($8,348 > 2,57058$) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,717 < 2,57058$) dan signifikansi ($0,147 > 0,05$). Dan hasil uji f menunjukkan hasil f hitung lebih besar dari f tabel $33,599 > 4,88$ berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan asli daerah merupakan elemen yang sangat penting untuk lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, sesuai dengan tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke 4 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendapatan asli daerah ini merupakan perwujudan yang sangat nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk daerah dan dikelola secara baik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Bab I pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan menurut *Marihot P. Siahaan (2009 : 14)*, pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah.

Tujuan dari PAD itu sendiri tercantum dalam BAB II Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 3 ayat 1 yang berbunyi PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Begitupun di Kabupaten Bandung yang merupakan Daerah Otonom di Jawa Barat, Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting dan dibutuhkan untuk membiayai seluruh anggaran kegiatan belanja pemerintahan daerah tersebut.

Kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah yang telah di atur dalam perundang-undangan tadi menuntut pemerintahan Kabupaten Bandung untuk menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dapat mendatangkan pemasukan guna pemenuhan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dari seluruh sektor yang ada di daerah Kabupaten Bandung yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pada Tahun 2014 Kabupaten Bandung menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 512 Milyar, namun pada semester pertama tahun 2014 raihan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung sudah mencapai Rp 240 Milyar atau sekitar 53% dari yang ditargetkan.

Kepala Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten Bandung, Sastra Laksana menjelaskan bahwa raihan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung paling signifikan berasal dari Pajak Penerangan Jalan Umum dan dari pajak daerah lainnya seperti pajak reklame, retribusi, pariwisata, pajak makanan minuman dan lainnya.

Target PAD 2014 sebesar Rp 512 miliar ini, kata Sastralaksana, meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp 439 miliar. Sedangkan untuk 2015 nanti, lanjut dia, tentunya bakal ada peningkatan target. Namun, akan dilihat terlebih dahulu dari realisasi PAD 2014 (*Inilah.com, Selasa 15/7/2014*)

Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung yang terus meningkat ini tidak terlepas dari pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung yang terus mendapatkan hasil positif dan bisa melampaui target yang telah ditetapkan.

Sumber penerimaan daerah yang ada di Kabupaten Bandung ataupun daerah lainnya telah diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah Bab IV Sumber Penerimaan Daerah pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, sedangkan untuk sumber pendapatan asli daerah itu sendiri diatur dalam undang undang nomor 33 tahun 2004 Bab V Pendapatan Asli Daerah pasal 6 ayat 1 pendaatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, lain lain PAD yang sah diatur dalam Bab V pasal 6 ayat 2 undang undang nomor 33 tahun 2004 yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Selama ini sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung masih mengandalkan dari sektor penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, Undang - undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya keperluan rakyat.

Pada undang – undang no 28 tahun 2009 Bab 2 bagian kesatu pasal 2 ayat 2 menyebutkan pula pajak kabupaten/kota terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak parkir. pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan retribusi daerah dijelaskan pada Bab I Pasal 1 ayat 64 yang menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek retribusi daerah di jelaskan pada bab VI bagian kesatu pasal 108 ayat 1 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Pelayanan Kesehatan (Jasmani), Retribusi Pelayanan, Persampahan ataupun kebersihan, Retribusi Penggantian suatu Biaya cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta juga Akte suatu Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan juga Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan pada Parkir pada Tepi Jalan Umum.

Retribusi jasa usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Penyedotan kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggahan atau Villa.

Sedangkan retribusi perizinan tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 -2015).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2009 – 2015
2. Bagaimana perkembangan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2009 – 2015
3. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung tahun 2009 – 2015
4. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2009 - 2015.
5. Seberapa besar pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2009 – 2015.
6. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2009 – 2015.

1.3 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Bale Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2009 – 2015
2. Perkembangan retribusi daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2009 – 2015
3. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bandung tahun 2009 – 2015
4. Besarnya pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2009 - 2015.
5. Besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2009 – 2015.
6. Besarnya pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Tahun 2009 – 2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini yaitu antara lain :

1. Bagi Instansi
Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga pemerintahan Kabupaten Bandung khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.
2. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.

3. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Bale Bandung. Dan menambah wawasan tentang pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada dasarnya merupakan mengaplikasikan pemahaman terhadap teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek atau aplikasi lapangan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana perkembangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung dengan lokus penelitian yaitu penelitian dititik beratkan pada bagian pendapatan pada instansi tersebut dan menggunakan teori akuntansi secara umum serta akuntansi sektor publik yang relevan sebagai landasan pemikiran serta teori pendukung.

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang Km. 17 No. Telpon/Fax. 022 5892926 dengan waktu penelitian Waktu pelaksanaan penelitian skripsi ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih enam bulan, dimulai bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017.

II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Sofyan Syafri; Teori Akuntansi (2011:4) menjelaskan :

“Akuntansi tepatnya akuntansi keuangan kapitalis atau ada juga yang menyebut akunting adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu”.

Sedangkan *Accounting Principles Board* (APB) dalam Sofyan Syafri Harahap (2011:5) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif”

2.1.2 Definisi Akuntansi Sektor Publik

Menurut Abdul Halim, syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik, (2012:3) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah

“Suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Bastian, 2001 dalam Akuntansi Sektor Publik (2009:1)

“Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana pada masyarakat di lembaga – lembaga tinggi Negara dan departemen departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek proyek – proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

2.1.3 Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:100).

“Pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak daerah ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan (Opsen) oleh Pemerintah Daerah”.

Dalam Perda Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 7 menjelaskan :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.4 Retribusi Daerah

Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:110) mendefinisikan :

“Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat”

Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat dan Daerah (2012:3) menyebutkan

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan” (Pasal 1 angka 27 UU PDRD)

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 18 menyebutkan :

“Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang - undangan.”

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan (2009 : 14),

“Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah”.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beta Asteria (STIE Widya Wihaha:2015) penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dengan hasil penelitian dimana secara parsial Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah kemudian secara parsial Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah, dan secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Jawa Tengah.

Vadia Vamiagustin, Suhadak, Muhadan Saifi, (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang : 2014) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

M. Zahari MS (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari:2016) dengan judul Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Selama periode 2010-2015, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD yang rata-rata 23,1% per tahun, dan kontribusi pendapatan retribusi daerah rata-rata 16,01% per tahun. Secara simultan, pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan PAD di Kabupaten Sarolangun.

2.2 Kerangka Pemikiran

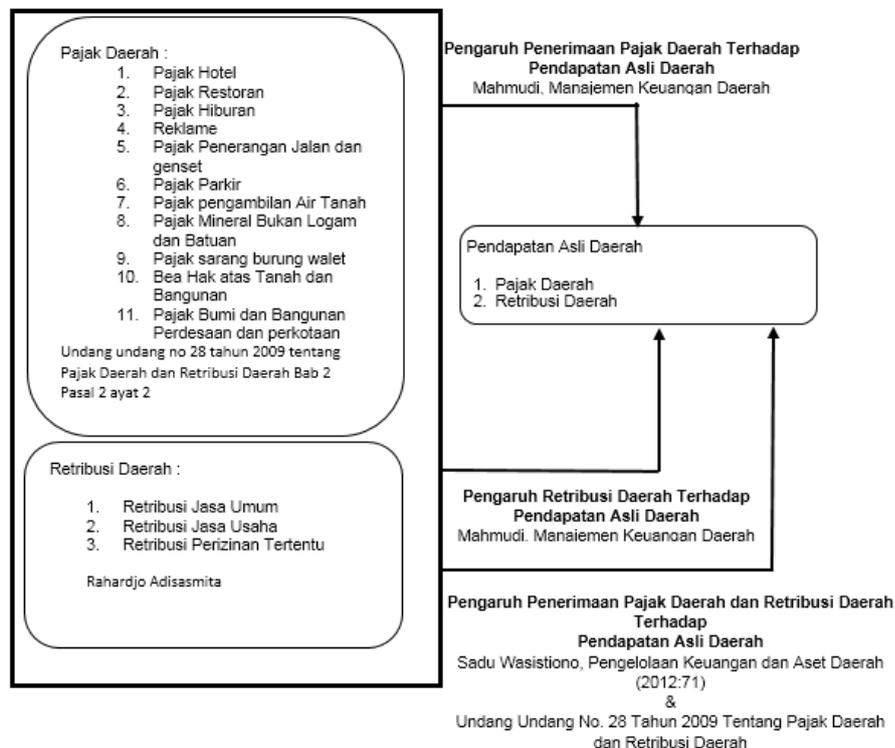
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang secara langsung dapat mempengaruhi naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri atas Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain lain pad yang sah. Peningkatan atau penurunan pendapatan Asli Daerah itu sendiri dipengaruhi oleh dimensi atau komponen dari Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut gambaran paradigma dalam penelitian ini :

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung | Muhammad Iqbal, Widhi Sunardika



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2009-2015.
2. Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2009-2015.
3. Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2009-2015.

III. Objek dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dengan lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung. Pemilihan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada pertimbangan bahwa BKD Kabupaten Bandung mempunyai data yang lengkap untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data numerik (angka).

Penulis menggunakan metode tersebut, karena penelitian ini ditujukan untuk menggambar pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana ketiga data tersebut merupakan data kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lembaga yang diteliti berupa laporan realisasi pendapatan daerah yang kemudian teliti kembali sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan penelitian ini.

3.2.1 Operasionalisasi variabel

Tabel 3.1
Operasional variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel bebas (X ₁): Pajak Daerah	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Perda Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan dan genset 6. Pajak Parkir 7. Pajak pengambilan Air Tanah 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 9. Pajak sarang burung walet 10. Bea Hak atas Tanah dan Bangunan 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan 	Rasio
Variabel bebas (X ₂): Retribusi Daerah	Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat (Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:110))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu 	Rasio
Variabel terikat (Y): Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah” (Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 18.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 	Rasio

3.3 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2014:80) adalah:

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 data yang terdapat di Badan Keudangan Daerah Kabupaten Bandung yang berupa rekapitulasi pendapatan daerah.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D(2014:81)

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 data yang berupa data rekapitulasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*, yang mana menurut Sugiyono dalam bukunya Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2014:85) disebutkan bahwa: “*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

3.4.1 Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data-data dari *literature*, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.4.2 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data itu sendiri. Pada penelitian ini penulis memperoleh data berupa Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 Sampai Dengan 2015 yang diperoleh langsung dari kepala bidang pendapatan 1 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)*. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Adapun uji asumsi klasik meliputi :

3.5.1 Uji Normalitas

Metode yang digunakan adalah dengan melihat distribusi normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Menurut Ghazali (2013:160) dalam bukunya Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 21, mengungkapkan bahwa :

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”.

Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal.

3.5.2 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas.

Tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW).

Durbin-Watson, dengan hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 : Tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono dalam bukunya *Statistika Untuk Penelitian* (2015:275), beliau mengemukakan bahwa:

"Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaikaturkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2".

Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

- Y : Variabel terikat (harga saham)
- X_1 : Variabel bebas (*Current Ratio*)
- X_2 : Variabel bebas (*Return On Asset*)
- A : Bilangan berkonstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai $X_1 X_2 = 0$
- $b_1 b_2$: Koefisien regresi

Untuk mencari a, b_1 dan b_2 dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \sum Y &= an + b_1 \sum X_1 + b_2 \sum X_2 \\ \sum X_1 Y &= a \sum X_1 + b_1 \sum X_1^2 + b_2 \sum X_1 X_2 \\ \sum X_2 Y &= a \sum X_2 + b_1 \sum X_1 X_2 + b_2 \sum X_2^2 \end{aligned}$$

3.6.2 Analisis Korelasi Ganda

Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut. Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara *current ratio* terhadap harga saham dan *return on asset* terhadap harga saham.

Langkah-langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis korelasi dapat diuraikan sebagai berikut:

3.6.2.1 Koefisien Korelasi Secara Parsial

Koefisien korelasi parsial antara X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y , serta X_1 terhadap X_2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2] [n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

Keterangan:

- R : Koefisien Korelasi
- X_1 : Selisih variabel bebas ke 2 dengan rata-rata variabel bebas ke 1
- X_2 : Selisih variabel bebas ke 1 dengan rata-rata variabel bebas ke 2
- y : Selisih variabel terikat dengan rata-rata variabel terikat

3.6.2.2 Koefisien Korelasi Secara Simultan

Koefisien korelasi secara simultan antara X_1 dan X_2 terhadap Y dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_{y.x_1x_2} = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2 \cdot r_{yx_1} \cdot r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

Keterangan:

- $R_{y.x_1x_2}$: Korelasi antara variabel X_1 dengan X_2 secara bersama-sama dengan variabel Y
- r_{yx_1} : Korelasi Product Moment antara X_1 dengan Y
- r_{yx_2} : Korelasi Product Moment antara X_2 dengan Y
- $r_{x_1x_2}$: Korelasi Product Moment antara X_1 dengan X_2

Besarnya koefisien korelasi adalah $-1 \leq r \leq 1$:

1. Apabila hasilnya (-) berarti terdapat hubungan negatif
2. Apabila hasilnya (+) berarti terdapat hubungan positif

Interpretasi dari nilai koefisien korelasi:

- a. Jika $r = -1$ atau mendekati -1 , maka hubungan antara dua variabel mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun, begitu juga sebaliknya)
- b. Jika $r = +1$ atau mendekati $+1$, maka terdapat hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan hubungannya searah.

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (*independent variabel*) terhadap variabel terikat (*dependent variabel*), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya Statistika untuk Penelitian (2015:231) sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2015:231)

Berdasarkan tabel di atas dapat diartikan bahwa:

1. Kedua variabel menunjukkan korelasi dari nol (0) sampai dengan satu (1)
2. Apabila sama dengan nol (0) kedua variabel tidak memiliki korelasi
3. Apabila sama dengan satu (1), maka kedua variabel memiliki korelasi yang signifikan/kuat.

3.6.2.3 Uji Pengaruh

Untuk menjawab rumusan masalah serta hipotesis penelitian, maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui besarnya pengaruh serta signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) baik secara parsial (sendiri-sendiri) maupun secara simultan (bersama-sama). Adapun metode pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Setelah diperoleh besarnya derajat kontribusi atau adanya indikasi pengaruh (koefisien beta : ρ) melalui pengujian analisis regresi linear berganda serta besarnya derajat keeratan hubungan antar variabel melalui pengujian analisis korelasi. Maka dihitung besarnya pengaruh untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh dengan langkah perhitungan sebagai berikut :

- a. Pengaruh parsial variabel X_1 terhadap variabel Y sebagai berikut : $(\rho X_1 Y)^2 \times 100\%$
- b. Pengaruh parsial variabel X_2 terhadap variabel Y sebagai berikut : $(\rho X_2 Y)^2 \times 100\%$
- c. Pengaruh secara simultan variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y sebagai berikut : $[\rho X_1 Y^2 + \rho X_2 Y^2 + (\rho X_1 Y^2 \times \rho X_2 Y^2 \times r_{X_1 X_2})] \times 100\%$

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis (2012:64) yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis diartikan sebagai dugaan atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif (H_a) menunjukkan adanya dampak antar variabel bebas dan variabel terikat. Adapun rancangan pengujian hipotesis yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

3.6.3.1 Uji Signifikansi Parsial (Hasil Uji t)

Setelah diketahui nilai t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai kesimpulan diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara t_{hitung} dengan ketentuan uji kriteria sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien negatif, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
3. Jika nilai $t - sig < \beta 0,05$ maka H_0 ditolak

3.6.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Hasil Uji f)

Setelah menghitung nilai f_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai kesimpulan diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara f_{hitung} dan f_{tabel} dengan ketentuan uji kriteria sebagai berikut:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien negatif, maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
3. Jika menggunakan program komputer (*software SPSS*) dan nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV. Hasil dan Pembahasan

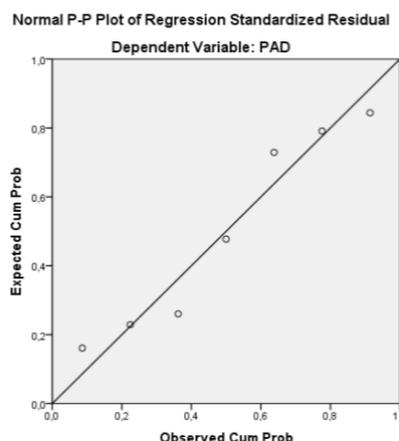
4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
N		7	7	7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	193,9500	40,2800	428,0257
	Std. Deviation	118,12526	11,66024	242,85043
Most Extreme Differences	Absolute	,215	,188	,172
	Positive	,158	,188	,172
	Negative	-,215	-,125	-,157
Kolmogorov-Smirnov Z		,569	,497	,454
Asymp. Sig. (2-tailed)		,903	,966	,986

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam pengujian ini sebanyak 7 data. Dalam tabel tersebut pula menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada Variabel X_1 (Pajak Daerah) sebesar 0,569 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,903 $> 0,05$, kemudian pada Variabel X_2 (Retribusi Daerah) menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada Variabel X_2 sebesar 0,497 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,966 $> 0,05$, dan Variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z pada Variabel Y sebesar 0,454 dengan nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,986 $> 0,05$ yang berarti data residual terdistribusi dengan normal atau H_0 diterima. Jika digambarkan dengan P-P Plot, gambarnya sebagai berikut :



Gambar 4.1 P-P Plot

Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa data menyebar dan mengikuti arah garis diagonal dan dapat disimpulkan bahwa model regresi dari data tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

4.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

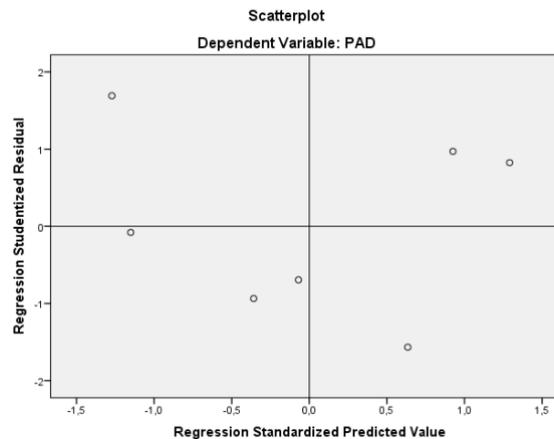
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	172,803	158,057			
1 Pajak Daerah	1,849	,289	,899	,708	1,412
Retribusi Daerah	-2,567	2,933	-,123	,708	1,412

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Tabel diatas menunjukkan nilai *tolerance* Variabel X₁ yaitu Pajak Daerah sebesar 0,708 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,412 < 10. Nilai *tolerance* Variabel X₂ yaitu Retribusi Daerah sebesar 0,708 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,412 < 10. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga kedua variabel tersebut bebas dari multikolinearitas.

4.1.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2 Scatterplot

Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 20

Gambar diatas menunjukkan bahwa tidak adanya pola yang jelas dalam penyebaran titik-titik, dan titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu X. Hal ini mengindikasikan tidak adanya gangguan heteroskedastisitas terhadap model regresi yang digunakan.

4.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,972 ^a	,944	,916	70,49878	1,908

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dari hasil analisis regresi didapat nilai DW adalah sebesar 1,908 jika dibandingkan dengan tabel signifikansi 5% dengan jumlah sampel (n) 7 didapat nilai dU 1,8964 (lihat tabel Durbin Watson pada lampiran). Nilai DW lebih besar dari batas dU yaitu $1,908 > 1,8964$ dan nilai DW lebih kecil dari 4-dU yaitu 4 dikurangi 1,8964 yang hasilnya 2,1036. Maka $1,8964 < 1,908 < 2,1036$ yang berarti nilai dU lebih kecil dari nilai DW, dan nilai DW lebih kecil dari batas dU dikurangi 4 ($dU < DW < 4-dU$). Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	172,803	158,057	
1 X1	1,849	,289	,899
X2	-2,567	2,933	-,123

a. Dependent Variable: Y

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 172.803 + 1,849 X_1 - 2,567 X_2$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Asli Daerah
- X₁ = Penerimaan Pajak Daerah
- X₂ = Retribusi Daerah

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 172.803
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau penerimaan pajak daerah (X₁) dan Retribusi daerah (X₂) nilainya 0, maka pendapatan asli daerah (Y) adalah 172.803.
2. Koefisien regresi penerimaan pajak daerah (X₁) sebesar 1,849
Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel penerimaan pajak daerah (X₁) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1,849 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi retribusi daerah (X₂) sebesar -2,567
Hal ini menunjukkan adanya indikasi adanya hubungan yang tidak searah yang artinya jika nilai variabel retribusi daerah (X₂) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah sebesar -2,567 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.2.2 Analisis Korelasi Ganda

Pada dasarnya korelasi merupakan nilai yang menunjukkan tentang ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih, variabel bebas yaitu Penerimaan Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) serta besarnya hubungan tersebut terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya antara dua variabel bebas secara bersama-sama atau lebih terhadap satu variabel terikat.

Tabel 4.6 Hasil Uji Korelasi Pearson

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	-,540	,966**
	Sig. (2-tailed)		,211	,000
	N	7	7	7
X2	Pearson Correlation	-,540	1	-,609
	Sig. (2-tailed)	,211		,147
	N	7	7	7
Y	Pearson Correlation	,966**	-,609	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,147	
	N	7	7	7

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 20

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi parsial X_1 terhadap Y adalah sebesar 0,966, X_2 terhadap Y adalah sebesar -0,609, X_1 terhadap X_2 adalah sebesar -0,540, maka hasil-hasil tersebut sesuai dengan perhitungan manual yang dilakukan peneliti dengan menggunakan rumus korelasi ganda dua variabel.

Hasil perhitungan manual tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan *IBM SPSS Statistic 20* sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,972 ^a	,944	,916	70,49878

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0,972, nilai tersebut sama dengan nilai koefisien korelasi secara simultan (bersama-sama) antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah secara simultan adalah searah, artinya jika penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah naik, maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,972 berada di antara 0,80 - 1,00 yang berarti variabel X_1 dan X_2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

4.2.3 Uji Pengaruh

Tabel 4.8 Hasil Koefisien Beta dan Zero Order

Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
				Beta	Zero-order	Partial
(Constant)		1,093	,336			
1 X1	,899	6,387	,003	,966	,954	,757
X2	-,123	-,875	,431	-,609	-,401	-,104

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil output SPSS diatas dapat nilai konstanta sebesar 1,093 dan nilai Koefisien beta untuk Penerimaan Pajak Daerah (X_1) adalah 0,899 dengan zero order yaitu 0,966 serta nilai koefisien beta retribusi daerah (X_2) adalah -0,123 dengan zero order -0,609. Dari hasil diatas maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh parsial Penerimaan pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015.

Nilai koefisien beta = 0,899
 Nilai zero-order = 0,966

Maka :

$$0,899 \times 0,966 = 0,869$$

Jadi pengaruh secara parsial Penerimaan Pajak Daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar 0,868 atau sebesar 86,9%

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, berikut adalah pengujian dengan menggunakan *software* SPSS versi 20 :

Tabel 4.9 Hasil Uji t Penerimaan pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	172,803	158,057		1,093	,336
1 X1	1,849	,289	,899	6,387	,003
X2	-2,567	2,933	-,123	-,875	,431

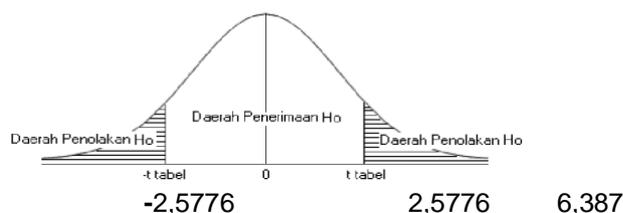
a. Dependent Variable: Y

Kriteria pengambilan Keputusan :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas penerimaan pajak daerah (X_1) adalah sebesar 6,387 dengan signifikansi 0,003 sedangkan t_{tabel} dengan dk 4 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($6,387 > 2,776$) dan taraf signifikansi X_1 (0,003) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat diputuskan jika penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015

Berdasarkan hasil uji t diatas kemudian dapat digambarkan daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :



Gambar 4.3 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 variabel X_1 variabel Y
 Sumber: Data Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dari gambar diatas terlihat jika hasil t_{hitung} untuk variabel Penerimaan Pajak Daerah (X_1) berada pada daerah penolakan H_0 yang disebabkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima yang berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2009 – 2015.

2. Pengaruh parsial retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015.

Nilai koefisien beta = -0,123
 Nilai zero-order = -0,609

Maka :

$$-0,123 \times -0,609 = 0,075$$

Jadi pengaruh secara parsial Retribusi Daerah (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar 0,075 atau sebesar 7,5%
 Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, berikut adalah pengujian dengan menggunakan *software* SPSS versi 20 :

Tabel 4.10 Hasil Uji t Retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	172,803	158,057		1,093	,336
X1	1,849	,289	,899	6,387	,003
X2	-2,567	2,933	-,123	-,875	,431

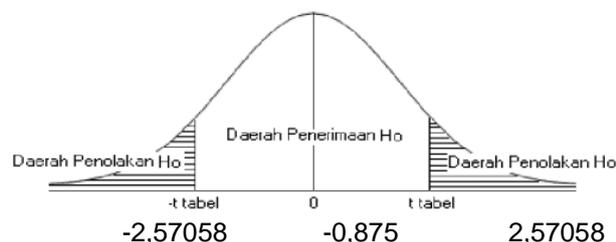
a. Dependent Variable: Y

Kriteria pengambilan Keputusan :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas retribusi daerah (X_2) adalah sebesar -0,875 dengan signifikansi 0,431 sedangkan t_{tabel} dengan dk 4 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($-0,875 < 2,776$) dan taraf signifikansi X_2 (0,431) lebih Besar daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian dapat diputuskan jika Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015

Berdasarkan hasil uji t diatas kemudian dapat digambarkan daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Variabel X_2 Variabel Y

Sumber: Data Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dari gambar diatas terlihat jika hasil t_{hitung} untuk variabel Retribusi Daerah (X_2) berada pada daerah penerimaan H_0 yang disebabkan oleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak yang berarti secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2009 – 2015.

3. Pengaruh Secara Simultan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Besarnya pengaruh X_1 terhadap Y = 0,869
 Besarnya pengaruh X_2 terhadap Y = 0,075
 Total = 0,944
 Y = 0,944 x 100%
 Y = 94,4%
 Total Pengaruh = 94,4 %

Secara simultan pengaruh penerimaan pajak (X_1) daerah dan retribusi daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2009 –

2015 adalah sebesar 94,3% dengan perhitungan koefisien determinasi sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Sugiyono (2012:240)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Dengan nilai r adalah sebesar 0,972 maka nilai koefisien determinasinya adalah sebagai berikut :

Kd = $0,972^2 \times 100\%$

Kd = $0,944 \times 100\%$

Kd = 94,4%

Dengan menggunakan SPSS Versi 20, maka didapat hasil output sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,972 ^a	,944	,916	70,49878

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,944. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,944 (94,4%). Yang berarti, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Periode 2009 – 2015 dipengaruhi oleh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 94,4%. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh tersebut, berikut adalah pengujian dengan menggunakan software SPSS versi 20 :

Tabel 4.12 Hasil Uji f Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah (X₂) terhadap pendapatan asli daerah (Y)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	333977,688	2	166988,844	33,599	,003 ^b
Residual	19880,313	4	4970,078		
Total	353858,002	6			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

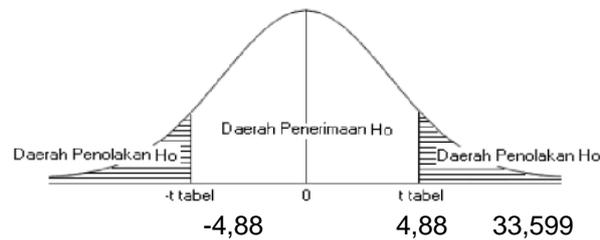
Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 20

Kriteria pengambilan Keputusan :

1. Jika f hitung < f tabel atau probabilitas > 0,05 maka H₀ diterima.
2. Jika f hitung > f tabel atau probabilitas < 0,05 maka H₀ ditolak.

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 33,599, sedangkan F - tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 4 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,003, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 33,599. Karena F-hitung > F-tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dari tabel ANOVA^a diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-f sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Penerimaan Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Berdasarkan hasil uji f yang telah didapat serta keputusan yang telah diambil, maka dibuat gambar daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 variabel X_1X_2 terhadap variabel Y

Sumber: Data Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan gambar diatas F hitung berada pada daerah penolakan H_0 , yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Karena F hitung $>$ F tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

4.3 Pembahasan

Setelah pengolahan atas data dalam penelitian ini selesai dilakukan, kemudian dilakukan pula pengujian hipotesis. Sebelum masuk kedalam tahap uji hipotesis, sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik, dari uji asumsi klasik ini diketahui data terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

4.3.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2009 – 2015

Jika dilihat dilihat dari segi realisasi, Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung dalam periode 2009 -2015 setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan rata – rata peningkatan sebesar Rp. 193.948.627.953,14 dengan realisasi terkecil sebesar Rp. 47.951.110.528,00 yang terjadi pada tahun 2009 dan capaian realisasi terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 340.007.248.935,00.

Namun dari segi perubahan penerimaan pajak daerah ini mengalami perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat, dimana naik turunnya perubahan ini dapat dilihat dari gambar 4.2 Grafik Fluktuasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung periode 2009 – 2015, dengan rata - rata perubahan dari penerimaan pajak daerah ini adalah sebesar Rp. 41.722.305.486,71 dengan perubahan terkecil adalah sebesar Rp. 10.822.704.219,00 yang terjadi pada tahun 2014 dan perubahan terbesar adalah sebesar Rp. 101.624.468.852,00 pada tahun 2013.

Peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak daerah ini disebabkan oleh naiknya pos pos pajak daerah yang menjadi sumber dari penerimaan pajak daerah itu sendiri yaitu antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan genset, pajak pengambilan bahan galian C, pajak parkir, pajak pengambilan air baah tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

4.3.2 Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2009 – 2015

Dari segi realisasi atau peningkatan secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bandung mengalami perubahan yang fluktuatif dimana pencapaian realisasi terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 60.254.329.366,00 dan Realisasi terkecil terjadi pada tahun 2015 dengan pencapaian Rp. Rp. 26.862.834.891,00 dengan rata – rata realisasi sebesar Rp. 40.280.308.348,86.

Sedangkan dari segi perubahan juga terjadi perubahan yang fluktuatif dan cenderung menurun, dari tabel 4.2 dapat terlihat jika perubahan terbesar terjadi pada tahun 2010 dengan besaran perubahan sebesar Rp. 19.383.444.259,00 dan perubahan terkecil terjadi pada tahun 2011 dengan perubahan sebesar Rp. (27.462.948.682,00. Rata – rata perubahan retribusi daerah Bandung adalah sebesar Rp. - 2.334.675.036,00.

Naik turunnya realisasi penerimaan retribusi daerah ini sendiri disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber sumber dari retribusi daerah itu sendiri dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari suber retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu yang akan mempengaruhi nilai dari retribusi daerah tersebut.

4.3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2009 – 2015

Dari segi relaisasi, pada setiap tahun dalam periode 2009 – 2015 pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, dimana realisasi terkecil dari pendapatan asli daerah itu sendiri terjadi pada tahun 2009 dengan raihan sebesar Rp. 152.549.655.824,00 dan raihan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 775.564.771.821,68, rata rata pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung pada periode tahun 2009 -2015 sebesar Rp. 428.026.005.787.

Sedangkan dari segi perubahan, pendapatan asli daerah mengalami perubahan yang fluktuatif dan cenderung naik, rata – rata dari perubahan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung yang terjadi dalam periode tahun 2009 – 2015 adalah sebesar Rp. 103.835.852.666,28 dengan perubahan terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 46.691.052.485,00 dan perubahan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 195.640.313.815,48.

Naik turunnya pendapatan asli daerah ini sangat tergantung oleh pencapaian sumber sumber dari yang tidak lain adalah penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan laba BUMD, dan lain lain PAD yang sah, dalam penelitian ini penulis dapat menyatakan bahwa naik turunnya Pendapatan Asli Daerah dapat disebabkan oleh naiknya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

4.3.4 Pengaruh parsial Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2009 – 2015

Berdasarkan hasil pengolahan data yang menggunakan nilai koefisien beta dan nilai zero order menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial antara variabel Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung dalam periode 2009 - 2015 adalah sebesar 86,9%, serta hasil uji t yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6,387 dengan signifikansi 0,003 sedangkan t_{tabel} dengan dk 4 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Dari hasil tersebut diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($6,387 > 2,776$) dan taraf signifikansi X_1 (0,003) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat diputuskan jika penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi dalam buku berjudul Manajemen Keuangan daerah (2013:21)

“Secara umum pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah”

Senada dengan teori tersebut penelitian yang dilakukan oleh Beta Asteria (2015) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah.

4.3.5 Pengaruh parsial Retribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2009 – 2015

Berdasarkan hasil pengolahan data yang menggunakan nilai koefisien beta dan nilai zero order menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial antara variabel Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung dalam periode 2009 - 2015 adalah sebesar 7,5%, Berdasarkan hasil dari uji pengaruh secara parsial (uji t) dapat diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel bebas retribusi daerah (X_2) adalah sebesar - 0,875 dengan signifikansi 0,431 sedangkan t_{tabel} dengan dk 4 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($-0,875 < 2,776$) dan taraf signifikansi X_2 (0,431) lebih Besar daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian dapat diputuskan jika Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015.

Hasil penelitian dari penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh R. Budi Hendaris dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat dimana dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa Secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.

4.3.6 Pengaruh simultan Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Peiode 2009 – 2015

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat terlihat bahwa variabel Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dalam periode 2009 - 2015, yaitu hasil f-hitung sebesar 33,599, sedangkan F-tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 5 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F-tabel sebesar 4,88. Karena F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Dari tabel ANOVA^a nilai signifikansi uji-f sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil berdasarkan tingkat signifikansinya bahwa Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan pula oleh hasil perhitungan manual serta Koefisien Determinasi (*R-Square*) yaitu sebesar 0,944 atau sebesar 94,4% dan sisanya yang merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah tetapi tidak diteliti ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) sebesar 0,056 atau sebesar 5,6% ($1 - R-Square$). Adapun faktor lain tersebut diantaranya adalah pos bagian laba BUMD dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil penelitian dari penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Beta Asteria (2015) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.

V. Simpulan dan Saran.

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka peneliti mendapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009 – 2015 terus mengalami peningkatan dengan perubahan yang fluktuatif yang disebabkan oleh naiknya pos - pos pajak daerah yang menjadi sumber dari penerimaan pajak daerah itu sendiri yaitu antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan genset, pajak pengambilan bahan galian C, pajak parkir, pajak pengambilan air

baah tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

2. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009 – 2015 mengalami perubahan yang fluktuatif baik dari segi realisasi maupun dari segi perubahannya hal ini disebabkan oleh adanya penghapusan atau penambahan sumber - sumber dari retribusi daerah itu sendiri dimana hal tersebut akan menyebabkan perubahan atas nilai atau pencapaian dari suber retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu yang akan mempengaruhi realisasi total dari retribusi daerah tersebut.
3. Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung setiap tahunnya dalam periode 2009 – 2015 terus mengalami peningkatan dengan perubahan yang fluktuatif dimana naik turunnya perubahan Pendapatan Asli Daerah dapat disebabkan oleh naik turunnya sumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri seperti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, serta variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) dan lain lain PAD yang sah.
4. Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan variabel pajak daerah mempunyai hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan dengan dibuktikan oleh nilai t_{hitung} untuk variabel penerimaan pajak daerah lebih besar dari pada t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), hal ini berarti penerimaan pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung dalam periode 2009 - 2015
5. Variabel retribusi daerah mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung dalam periode 2009 – 2015 hal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji parsial variabel retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dimana nilai t_{hitung} dari perhitungan tersebut lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$).
6. Secara simultan, variabel bebas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat. Dimana hasil analisis uji simultan menunjukkan hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} yang menunjukkan nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa Kabupaten Bandung mampu memanfaatkan sumber - sumber dari pendapatan asli daerah dengan baik sehingga setiap tahunnya dalam periode 2009 sampai dengan 2015 pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, peningkatan dari pendapatan asli daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mampu menunjukkan kemandirian dan menjawab tantangan sistem otonomi daerah yang mengharuskan setiap daerah untuk mencari dan memanfaatkan sumber – sumber pendapatan yang berada dalam daerahnya sendiri, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung sudah cukup baik. Adapun saran dari penulis yang berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bandung hendaknya lebih mengorganisir dan memanfaatkan secara efektif terhadap potensi dan sumber – sumber pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung itu sendiri.
2. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah di Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun alangkah lebih baiknya jika pemerintah Kabupaten Bandung lebih meningkatkan kinerja dalam hal tersebut baik dari dikarenakan retribusi daerah itu sendiri merupakan hal yang secara langsung bersinggungan dengan pelayanan dan kontraprestasi kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

3. Raihan positif dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung harus dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan cara menggali dan memanfaatkan dengan baik sumber sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini tentu sangat tergantung pada peningkatan atas nilai yang ada pada sumber –sumber pendapatan asli daerah itu sendiri seperti halnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah ini sendiri adalah salah satu sumber pendanaan yang cukup diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk membiayai seluruh anggaran belanja daerah di Kabupaten Bandung.
4. Penerimaan pajak daerah mempunyai hubungan searah yang kuat dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka dari itu pemerintah Kabupaten Bandung harus lebih meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah tersebut untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung guna memenuhi kebutuhan finansial Pemerintah Kabupaten Bandung yang bersumber dari daerah itu sendiri.
5. Pemerintah kabupaten Bandung harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan retribusi daerah dan harus dapat meningkatkan perolehan retribusi daerah itu sendiri, dimana cara yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan retribusi daerah bisa dengan peningkatan dibidang pelayanan yang terarah dan terpadu dalam penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan retribusi daerah tersebut kemudian sosialisasi yang efektif yang bisa menarik minat masyarakat secara luas dalam pemanfaatan retribusi yang disediakan oleh pemerintah Kab. Bandung.
6. Pemerintah Kabupaten Bandung harus dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dimana kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh signifikan yang kuat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk dapat meningkatkan hal tersebut diatas tentu pengelolaan dan kinerja dari pemerintahan itu sendiri harus sangat baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih membahas secara menyeluruh dan mendalam dalam pembahasan mengenai teori-teori dan pengolahan data dari sumber datanya secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung. Humaniora.
- Adisasmita Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Agoes Sukrisno. Trisnawati Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta. Salemba Empat.
- Arikunto, Suharimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rosda.
- Fahmi Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung. Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim Abdul, Kusufi Syam. 2012 *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hery. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- L. M. Samryn. 2012. *Pengantar Akuntansi : mudah membuat jurnal dengan pendekatan siklus transaksi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nazir, Mochammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. 2010. Bandung. Penerbit Erlangga.
- Murhadi R Werner. 2013. *Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Evaluasi Saham*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kasmir. 2013. *analisis laporan keuangan*. Jakarta. Rajawali pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Sofyan. 2011, *Teori Akuntansi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Wasistiono Sadu. 2012, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung. Fokus Media.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Perda No. 1 Tahun 2011 Kabupaten Bandung tentang Pajak Daerah.
Perda No. 6 Tahun 2016 Kabupaten Bandung, tentang Pajak Daerah.
Asteria Beta. 2015. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. STIE Widya Wihaha
- Hendaris Budi R. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Jawa Barat*. Prpgram Studi Akuntansi Universitas Achmad Yani.
- MS. Zahari M. 2016. *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Saro Langun*. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batangan.
- Mustika Ayu Winda. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STSIESTA) Surabaya.
- Saifi Muhadan. Suhandak. Vamia Agustin Vadia. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010 – 2012)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Setiadi Tri Henri, Mayowan Yuniadi, Mafaza Wildah. 2016. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan*. Program Studi Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.